



ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL: STUDI KOMPARATIF BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DINAS SOSIAL KOTA SUKABUMI

Agung Muhamad Sidik, Sulaeman, Gatot Wahyu Nugroho
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammaadiyah Sukabumi
agungmhmdsdk@gmail.com : sulaeman1342@ummi.ac.id :
gatotwahyunu2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dua program bantuan sosial, yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi ketidakakuratan sasaran penerima, keterlambatan distribusi, minimnya literasi keuangan, serta lemahnya sistem pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua program telah berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat, efektivitasnya masih terbatas oleh kendala administratif dan teknis di lapangan. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, dibutuhkan pemutakhiran data penerima secara berkala, penguatan sistem pengawasan, serta edukasi keuangan kepada penerima manfaat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat guna dalam distribusi bantuan sosial.

Kata kunci: Bantuan Sosial, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Langsung Tunai

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of two social assistance programs Non-Cash Food Assistance (BPNT) and Direct Cash Assistance (BLT) managed by the Social Affairs Office of Sukabumi City. The main issues encountered include mistargeted recipients, delayed distributions, low financial literacy, and weak oversight mechanisms. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that although both programs have been implemented and provide benefits to the community, their effectiveness is still hindered by administrative and technical challenges. To enhance program performance, regular data updates, stronger monitoring systems, and financial education for beneficiaries are necessary. These findings are expected to serve as a reference for better policy formulation in social aid distribution.

Keywords: Social Assistance, Non-Cash Food Assistance, Direct Cash Assistance

1. Pendahuluan

Program bantuan sosial merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, berbagai bentuk bantuan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah diluncurkan untuk menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan. Khususnya di Kota Sukabumi, kedua program ini menjadi andalan Dinas Sosial dalam menjalankan fungsi perlindungan sosial. Namun dalam pelaksanaannya, sejumlah permasalahan masih sering terjadi, mulai dari pendataan yang tidak akurat, keterlambatan penyaluran, hingga lemahnya pengawasan dan transparansi penggunaan dana.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak bantuan yang tidak tepat sasaran, bahkan beberapa penerima tidak memenuhi kriteria sebagai warga miskin. Selain itu, minimnya literasi keuangan juga membuat bantuan yang diberikan tidak selalu dimanfaatkan secara produktif. Permasalahan ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengelolaan bantuan sosial belum sepenuhnya optimal. Sebagai mahasiswa akuntansi, penulis melihat perlunya meninjau hal ini dari perspektif akuntansi sektor publik, khususnya dalam aspek pencatatan, pelaporan, dan pengendalian internal, agar program dapat dijalankan secara lebih akuntabel dan efisien.

Pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun terakhir telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi

masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut adalah melalui program-program bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kedua program ini didesain sebagai solusi jangka pendek sekaligus bagian dari strategi jangka panjang dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Secara teknis, bantuan disalurkan melalui berbagai mekanisme dan bekerjasama dengan bank penyalur, e-warong, serta aparat desa atau kelurahan agar menjangkau kelompok sasaran dengan lebih cepat dan tepat. Namun dalam praktiknya, realitas di lapangan sering kali tidak seideal rencana.

Permasalahan yang muncul bukan hanya terkait teknis distribusi, tetapi juga menyangkut hal yang lebih mendasar seperti akurasi data penerima manfaat, transparansi dalam pengelolaan dana, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat penerima bantuan. Di Kota Sukabumi misalnya, tidak sedikit ditemui kasus di mana penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria kemiskinan yang telah ditetapkan pemerintah. Sebaliknya, banyak warga yang tergolong miskin dan seharusnya berhak justru luput dari bantuan akibat data yang tidak diperbarui atau tidak akurat. Selain itu, efektivitas bantuan juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana penerima memanfaatkan bantuan tersebut. Jika dana bantuan digunakan hanya untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, maka dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan jangka panjang menjadi sangat terbatas.

Melihat kondisi tersebut, penting bagi peneliti untuk mengkaji bagaimana sebenarnya proses pengelolaan kedua program ini dilakukan, khususnya oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan kebijakan ini di tingkat daerah. Efektivitas pengelolaan bantuan sosial bukan hanya soal seberapa banyak bantuan tersalurkan, tetapi lebih dari ituapakah bantuan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan apakah pelaksanaannya dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi, membandingkan kinerja keduanya, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi pengelolaan bantuan sosial di lapangan.

Adapun kontribusi yang ingin dicapai dari penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang efektivitas program bantuan sosial dalam konteks pengelolaan keuangan publik. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak Dinas Sosial dalam memperbaiki strategi penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran, transparan, dan bermanfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat penerima. Penulis berharap bahwa melalui

penelitian ini, dapat ditemukan rekomendasi strategis yang tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga bermanfaat secara praktis bagi Dinas Sosial dan pihak-pihak terkait lainnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan efektivitas program bantuan sosial, mendorong perbaikan sistem penyaluran, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi berbasis data yang valid dan terkini. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya menjadi alat pelengkap kebijakan, tetapi benar-benar menjadi sarana pemberdayaan masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.

2. Kajian Pustaka

2.1 Bantuan Sosial

Bantuan sosial (bansos) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan dukungan ekonomi kepada individu atau keluarga miskin serta rentan terhadap risiko sosial. Bantuan ini dapat berbentuk tunai maupun non-tunai. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat miskin melalui program pemberdayaan, subsidi, dan jaminan sosial (Kemensos, 2021).

2.2 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT merupakan salah satu program strategis dalam rangka memperkuat ketahanan pangan masyarakat miskin. Bantuan ini diberikan dalam bentuk non-tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong yang telah bermitra dengan pemerintah. Tujuan dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar, tetapi juga mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi lokal (Katadata, 2023). Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diatur dalam Permensos Nomor 20 Tahun 2019 dan dijalankan dengan melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memastikan transaksi yang efisien dan akuntabel.

2.3 Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Sementara itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan dalam bentuk uang tunai langsung kepada masyarakat yang terdampak krisis ekonomi, pandemi, atau kebijakan fiskal seperti pengurangan subsidi energi. Bantuan Langsung Tunai (BLT) bertujuan menjaga daya beli dan memberikan fleksibilitas bagi penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Meskipun Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki kelebihan dalam hal kecepatan dan kemudahan penyaluran, program ini juga memiliki kelemahan, terutama pada aspek penggunaan dana yang kurang terkontrol

jika tidak disertai edukasi keuangan (Malika et al., 2024; Devi & Budiantara, 2024).

2.4 Efektivitas Program Bantuan Sosial

Efektivitas secara umum diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mahmudi, 2021). Dalam konteks bantuan sosial, efektivitas diukur berdasarkan indikator seperti ketepatan sasaran, ketepatan waktu penyaluran, transparansi, dan keberlanjutan dampak sosial (Noviawan, 2023; Irfan, 2023). Efektivitas pengelolaan bansos tidak hanya bergantung pada sistem penyaluran, tetapi juga pada integritas data dan pengawasan pelaksanaan di lapangan. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami penyimpangan dalam pengelolaan bantuan adalah teori GONE (Greed, Opportunity, Need, Exposure) yang mengidentifikasi empat faktor penyebab terjadinya kecurangan atau ketidakefisienan dalam program sosial (Ismatullah & Eriswanto, 2016).

2.5 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah sistem pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan yang digunakan di lembaga pemerintahan. Tujuannya adalah untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara (Mardiasmo, 2021). Menurut Abdul Halim (2019), prinsip penganggaran sektor publik harus memenuhi unsur komprehensif, otorisasi legislatif, periodik, akurat, serta dapat diketahui publik. Pengelolaan bansos wajib mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya PSAP No. 2, yang mewajibkan pencatatan akrual atas kewajiban pemerintah terhadap penerima manfaat. Hal ini berarti bahwa bantuan harus dicatat bukan saat dana disalurkan, tetapi saat hak penerima telah ditetapkan (Ramlji, 2020).

Konsep *value for money* juga menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan publik, yaitu bagaimana dana publik dikelola berdasarkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Majid, 2019). Dalam konteks ini, akuntansi sektor publik bukan hanya sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol dan evaluasi kinerja program sosial.

2.6 Sistem Pengendalian dan Transparansi

Pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan sosial sangat krusial untuk menghindari penyelewengan dana. Audit internal dan penggunaan sistem digital menjadi kunci dalam memastikan keakuratan data dan akuntabilitas pelaksanaan. Menurut Adrianti (2024), sistem pengendalian internal yang baik harus mencakup pemantauan langsung di lapangan, pelaporan berkala, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Tanpa sistem ini,

efektivitas program rentan menurun akibat rendahnya partisipasi dan lemahnya mekanisme korektif.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini digunakan karena peneliti ingin memahami secara mendalam proses pengelolaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi, terutama dalam hal efektivitas dan akuntabilitasnya. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali data secara lebih fleksibel dan kontekstual, sesuai dengan realitas yang ada di lapangan (Sugiyono, 2022).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Dinas Sosial Kota Sukabumi karena institusi ini menjadi pelaksana utama program bantuan sosial, khususnya BPNT dan BLT. Penelitian dilakukan selama dua bulan, terhitung dari Mei hingga Juni 2025, dengan mempertimbangkan waktu distribusi bantuan dan keterjangkauan informan yang relevan.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pegawai Dinas Sosial, pendamping bantuan, serta penerima manfaat program. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi seperti laporan pelaksanaan program, regulasi pemerintah, dan data penerima manfaat.

Teknik pengumpulan data meliputi:

3.3.1 Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono 2022:231).

3.3.2 Observasi

Menurut Nasution (1988) dalam (Sugiyono, 2022:297) mengemukakan bahwa observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Dan menurut Marshal (1995) melalui observasi peneliti dapat mempelajari tentang perilaku juga dengan makna dari perilaku tersebut. oleh karena itu, observasi merupakan metode penting dalam

penelitian ilmiah karena dapat memberikan dasar dan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti, baik dari segi perilaku maupun maknanya.

3.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu atau lampau. Dokumen bisa berupa gambar, tulisan atau karya monumental seseorang. Hasil penelitian juga akan lebih kredibel jika didukung oleh foto atau tulisan akademik dan seni yang ada (Sugiyono, 2022:240).

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, & Saldana (2014), yang terdiri dari tiga tahapan utama:

3.4.1 Reduksi Data

Reduksi data ialah memilih yang penting, membuat kategori (huruf besar, huruf kecil, angka) dan membuang yang tidak dipakai. Reduksi data adalah proses kognitif yang rumit yang membutuhkan tingkat keluasan dan kedalaman wawasan serta kecerdasan yang tinggi. Dalam hal reduksi data, peneliti pemula dapat berbicara dengan teman atau profesional lainnya tentang hal ini. Pemahaman peneliti akan tumbuh dari percakapan ini, sehingga memungkinkannya untuk merampingkan data dengan hasil yang penting dan potensi pengembangan teori (Sugiyono, 2022:248).

3.4.2 Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penyajian informasi bisa dilakukan dalam wujud penjelasan pendek, bagan, ikatan antar jenis, serta sejenisnya. Dalam perihal ini Miles serta Huberman melaporkan kalau yang sangat kerap digunakan buat menyajikan informasi kualitatif merupakan bacaan naratif (Sugiyono, 2022: 249).

3.4.3 Validasi Data

Untuk menguji validitas informasi yang sudah terkumpul peneliti melakukan uji penelitian melalui teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2022:273).

3.4.4 Penarikan kesimpulan

Kesimpulan diperoleh dari pola dan hubungan antar data, lalu diverifikasi dengan triangulasi agar validitasnya terjamin.

3.5 Penarikan Kesimpulan

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber, teknik, maupun waktu. Langkah ini bertujuan untuk membandingkan data dari berbagai sumber dan metode sehingga dapat meningkatkan kredibilitas hasil penelitian (Patton, 2015).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Efektivitas Pengelolaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi menunjukkan kontribusi positif dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar pangan. Bantuan ini disalurkan melalui kartu elektronik KKS yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warung. Sistem ini dinilai cukup efisien karena mengurangi praktik penyalahgunaan dan mendorong inklusi keuangan (Kemensos, 2023).

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa permasalahan di lapangan. Keterlambatan pencairan, kesalahan dalam data penerima, dan ketidaksesuaian jumlah serta kualitas komoditas yang diterima merupakan beberapa kendala utama. Keluhan juga muncul dari masyarakat lanjut usia yang kesulitan mengakses informasi terkait jadwal pencairan dan penggunaan kartu, yang menunjukkan kurangnya literasi informasi dan sosialisasi yang efektif.

4.2 Efektivitas Pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan secara langsung ke rekening penerima dan bertujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang tidak stabil. Program ini memberikan fleksibilitas bagi penerima untuk menggunakan dana bantuan sesuai kebutuhan, yang merupakan kelebihan dari sisi pemanfaatan (Devi & Budiantara, 2023). Meski demikian, pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih menghadapi sejumlah hambatan seperti keterlambatan pencairan dan minimnya sosialisasi. Informasi mengenai bantuan kerap kali lebih dahulu beredar di masyarakat dibandingkan di tingkat kelurahan atau Dinas Sosial, menunjukkan lemahnya komunikasi vertikal dari pusat ke daerah (Esa et al., 2024).

4.3 Perbandingan Efektivitas BPNT dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Berdasarkan hasil penelitian, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lebih terkontrol dari sisi penggunaan bantuan karena diarahkan untuk kebutuhan pangan, sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) memberikan keleluasaan pemanfaatan. Namun, keduanya belum sepenuhnya efektif secara berkelanjutan karena tidak menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi. Efektivitas kedua program sangat bergantung pada kualitas data penerima, efisiensi distribusi, serta efektivitas pengawasan di lapangan (Mardiasmo, 2021).

4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) antara lain adanya sistem digitalisasi, keterlibatan pendamping sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan TKSK, serta regulasi dari pemerintah pusat yang menjadi landasan operasional. Namun, tantangan tetap ada, terutama pada lemahnya koordinasi lintas sektor, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan kewenangan Dinas Sosial daerah dalam menentukan sasaran penerima bantuan.

5. Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi telah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya efektif. BPNT dinilai lebih terkontrol karena bantuan hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan tertentu melalui e-warong, sedangkan BLT memberikan fleksibilitas lebih kepada penerima manfaat dalam menggunakan dana bantuan.

Kendala utama yang ditemukan dalam kedua program ini adalah ketidakakuratan data penerima, keterlambatan penyaluran bantuan, kurangnya sosialisasi, serta literasi informasi dan keuangan yang rendah di kalangan masyarakat. Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan kapasitas kelembagaan lokal juga menjadi faktor penghambat efektivitas program.

Meskipun demikian, keberadaan program ini tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga daya beli di tengah situasi ekonomi yang sulit. Peran pendamping sosial, pemanfaatan sistem digital, serta regulasi dari

pemerintah pusat menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan program.

5.2 Saran

Agar pengelolaan program BPNT dan BLT di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Sosial perlu melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat secara berkala dengan melibatkan RT, RW, dan tokoh masyarakat setempat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar tepat sasaran.
2. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan, khususnya terkait jadwal pencairan, prosedur penggunaan bantuan, serta edukasi literasi keuangan agar bantuan dimanfaatkan secara bijak dan produktif.
3. Optimalisasi peran Puskesos dan pendamping sosial dalam mendampingi penerima manfaat akan sangat membantu kelancaran penyaluran serta menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
4. Perluasan penggunaan aplikasi seperti “Cek Bansos” serta pengembangan fitur informasi berbasis SMS atau WhatsApp dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi secara cepat dan akurat.
5. Diperlukan evaluasi program yang melibatkan masyarakat secara langsung agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan program bantuan sosial dapat dikelola dengan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan sehingga mampu benar-benar menjadi solusi dalam mengatasi persoalan sosial dan kemiskinan di daerah.

Daftar Pustaka

- Adrianti, R. (2024). *Penguatan sistem pengawasan dalam program bansos*. *Jurnal Sosial dan Kebijakan Publik*, 8(2), 101–112.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Devi, K., & Budiantara, M. (2024). Efektivitas BLT bagi kelompok rentan di Manokwari. *Jurnal GEMBIRA*, 2(1), 33–45.
- Esa, R., Handayani, T., & Sutrisno, A. (2024). Kendala penyaluran BLT dan dampaknya terhadap kesejahteraan. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 5(2), 78–90.

- Fachrul, R. A., Milfa, A., & Yahfizham. (2023). Perancangan sistem informasi pendataan BLT di Kabupaten Asahan. *ITTC Indonesia*, 6(1), 49–60.
- Irfan, H. (2023). Analisis efektivitas BLT dalam menunjang konsumsi rumah tangga. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 14(1), 88–97.
- Ismatullah, M., & Eriswanto, R. (2016). Penerapan teori GONE dalam menganalisis penyimpangan pengelolaan dana sosial. *Jurnal Transparansi Publik*, 3(2), 23–34.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*. Jakarta: Kemensos.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Pedoman umum pelaksanaan program BPNT dan BLT tahun 2023*. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.
- Mahmudi. (2021). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Majid, A. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan berbasis value for money. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 7(2), 55–67.
- Malika, N., Suryani, L., & Hafizh, M. (2024). Penggunaan bantuan langsung tunai untuk pengeluaran produktif rumah tangga. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 12(1), 99–110.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (1988). *Metode research (penelitian ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noviawan, R. (2023). Tinjauan efektivitas program bansos nasional. *Jurnal Manajemen Kebijakan Publik*, 11(1), 20–32.
- Nurlina, S., & Saputro, E. (2022). Transparansi dan akuntabilitas dana publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 123–134.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Putri, A., & Ramadhan, I. (2021). Strategi peningkatan efektivitas bansos berbasis partisipasi warga. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 6(2), 67–75.
- Ramli, M. (2020). Penerapan PSAP 02 dalam pencatatan bantuan sosial pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 5(1), 44–56.
- Saputra, A., & Handayani, D. (2021). Akuntabilitas dana sosial di tingkat desa. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 4(3), 55–66.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.